**Eksistensi Forum Keserasian Sosial sebagai Upaya Meredam Konflik Sosial**

**di Masyarakat**

***The existence of the Social Harmony Forum as an Effort to Reduce Social Conflict***

***in society***

**Oleh: Andayani Listyawati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: [andayani307@yahoo.com](mailto:andayani307@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian tentang eksistensi forum keserasian sosial sebagai upaya meredam konflik sosial di masyarakat bertujuan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial dalam program kerjanya mampu meredam konflik dan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik yang dilaksanakan di Kota Ambon, Maluku. Latar belakang Ambon sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah rawan konflik di Indonesia yang menerima bantuan dana penguatan keserasian sosial. Dana penguatan digunakan untuk melaksanakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat dengan harapan berbagai permasalahan pemicu konflik dapat diminimalisir atau dicegah. Pendekatan yang digunakan kuantitatif kualitatif , pengumpulan data secara wawancara terstruktur dan kuesioner selanjutnya didukung dengan pengamatan dan telaah dokumen. Dalam rangka memperoleh data yang valid dan reliabel diungkap informasi dari pengurus forum, tokoh masyarakat, pendamping forum, dan aparat dinas terkait. Hasil penelitian menyimpulkan, melalui analisis regresi dengan variabel komunikasi, sumberdaya, komitmen, dan struktur pelaksana keberadaan forum menunjukkan efektif dapat meminimalisir atau mencegah potensi konflik dengan sumbangan nilai 42,7% yang mengandung arti kondisi kemasyarakatan relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi dukungan keberadaan kearifan lokal berupa nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat mampu menyumbang keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karena itu rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial supaya lebih mendayagunakan kearifan lokal dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial. Sementara seyogyanya ada upaya peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan, dan monitoring agar eksistensi forum keserasian sosial dapat lebih bermanfaat dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.

***Kata Kunci: forum keserasian sosial;konflik sosial; masyarakat***

***Abstract***

Research on the existence of social harmony forum as an effort to reduce social conflict in society aims to know the existence of social harmony forum in its work program is able to reduce conflict and know the factual condition of conflict prone areas implemented in Ambon City, Maluku. Background Ambon as a research location because it is one of conflict-prone areas in Indonesia that receive social strengthening support. Strengthening funds are used to implement programs tailored to local needs in the hope that various conflict-triggering problems can be minimized or prevented. Qualitative quantitative approaches, structured interview data collection and further questionnaires are supported by observation and document review. In order to obtain valid and reliable data is disclosed information from forum administrators, community leaders, forum companions, and related government officials. The result of the research concludes that through regression analysis with communication variable, resources, commitment, and executor structure of existence of forum shows effective to minimize or prevent potential conflict with contribution value 42,7% which mean condition of social condition is relatively conducive although not maximal. the support of local wisdom in the form of local values, the role of cadres, traditions and community values ​​together can contribute to the successful implementation of the program. Therefore, the recommendation is addressed to the Ministry of Social Affairs cq Directorate of Social Protection of Social Disaster Victims to better utilize local wisdom and establish partnership with related parties as potential and source for strengthening social cohesiveness in supporting the success of social harmony program. While there should be efforts to increase the intensity of mentoring, coaching, and monitoring for the existence of social harmony forums can be more useful in minimizing or preventing social conflicts in the community.

***Keywords: social harmony forum, social conflict; community***

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara pluralis, masyarakatnya majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan potensi bangsa yang sangat handal apabila dikelola dengan tepat dalam rangka mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan. Hakikatnya dalam kehidupan kemasyarakatan akan tercermin sikap dan perilaku, seperti rukun, tepa saliro, akrab, saling menghormati, kesatuan dan keseimbangan, tanggungjawab, saling ketergantungan, tidak terjadi dominasi eksploitasi, pertukaran yang saling menguntungkan, saling pengertian serta adanya kesamaan pandangan. Hal ini senantiasa ditumbuhkembangkan dan dilestarikan agar tercapai keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kondisi tersebut terwujud maka akan terjadi keserasian sosial di lingkungan masyarakat dan pemicu terjadinya konflik sosial dapat diminimalisir atau dicegah.

Konflik sosial terjadi akibat terjadinya perselisihan atau pertikaian antara kedua belah pihak. Konflik ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat (Bakri, 2015). Seta Basri mengungkapkan, bahwa konflik yang terjadi di Indonesia berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat (Sukardi, 2016). Pada hakikatnya konflik cenderung berkonotasi negatif, namun apabila konflik dikelola secara baik niscaya mampu menjadi kekuatan dan perubahan positif. Machiavelli dan Hobbes (dalam Koswara, et.al:2005) mengungkapkan, bahwa karakter dasar manusia secara kontinyu menciptakan kondisi konflik karena tiap individu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Sejalan hal tersebut Khofifah Indar Parawansa (saat itu sebagai

Menteri Sosial) menyebut, meningkatnya potensi konflik sosial belakangan ini sebagai salah satu dampak dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia (kbknews.id, 2017)

Beberapa kasus konflik sosial yang teridentifikasi antara tahun 2013 hingga April 2015 sebagai berikut. Tahun 2013 terjadi konflik sosial mencapai 92 peristiwa diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan ada16 kasus, isu SARA sejumlah 9 kasus, konflik kesenjangan sosial sebanyak 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan sebanyak 2 kasus, konflik ormas ada 6 kasus, sengketa lahan sebanyak 11 kasus, serta ekses politik sebanyak 9 kasus. Tahun 2014 jumlah konflik sosial tercatat sebanyak 83 kasus rinciannya bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan ada 20 kasus, isu SARA ada 1 kasus, kesenjangan sosial tidak ada kasus, konflik ormas berjumlah 1 kasus, sengketa lahan berjumlah 6 kasus dan ekses politik sejumlah 2 kasus (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, 2016). Tahun 2015 terjadi kasus pembunuhan Salim kancil. Dari berbagai sumber terdata, Konsorsium Pembaharuan Agraria mengidentifikasi tahun 2016 terjadi konflik berkait agraria sebanyak 450 kasus. Kompas mendata sepanjang tahun 2015 hingga 2016 telah terjadi konflik SARA sebanyak 1.568 kasus. Menyimak ilustrasi dari kejadian beberapa konflik sosial yang terjadi, alangkah baiknya ada kelembagaan sosial yang menjadi tempat pihak berkonflik untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui negosiasi dan dialog (Susan, 2012). Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan warganya tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulangan konflik baik sejak dari pencegahan, penghentian maupun pemulihan pasca konflik yang dituangkan dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat telah mengucurkan program keserasian social bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakikat kegiatan untuk memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Secara legalitas melalui Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Bantuan Sosial Nomor: 09/SK/BS.04.I/2012 sebagai turunan dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan *(preventive action)* supaya potensi konflik yang ada di masyarakat tidak menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan *Community based social disaster risk management* diharapkan dapat mewujudkan keserasian sosial (Petunjuk Teknis Keserasian Sosial, 2016).

Melalui program keserasian sosial diberikan bantuan stimulan sebesar Rp 109 juta yang ditujukan untuk kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka penanganan konflik, besaran bantuan dana dirasakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya besaran dinaikkan menjadi Rp 146 juta. Diharapkan dengan naiknya besaran program bantuan dapat memperbaiki, menyempurnakan bahkan mengoptimalkan program sehingga akan terjalin kekompakan, keakraban, harmonisasi, dan kohesivitas tumbuh berkembang lebih baik. Hal ini dikuatkan dari hasil kajian Tim B2P3KS (2017), bahwa bantuan penguatan keserasian sosial tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan kegiatan forum lainnya sehingga diperlukan tambahan dana dengan harapan program yang dicanangkan dapat memenuhi target yang diharapkan. Sejauh ini melalui keberadaan forum keserasian sosial, berefek situasi masyarakat di daerah rawan konflik relatif lebih kondusif karena berbagai permasalahan dapat ditangani melalui pendekatan forum keserasian sosial dan unsur kearifan lokal (nilai, tradisi, ketokohan) sebagai alternatif pengembangan program keserasian sosial. Kajian empirik eksistensi forum keserasian sosial memperlihatkan, bahwa melalui program forum keserasian sosial dapat meminimalisir dan atau mencegah terjadinya konflik sosial di daerah rawan konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya forum keserasian sosial sangat dibutuhkan masyarakat untuk meredam konflik, tidak hanya dalam segi keamanan tetapi tersirat ada pendekatan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa untuk saling toleransi menghormati perbedaan. Berbagai penguatan dialokasikan dari dana stimulan digunakan untuk meredam konflik. Hal ini merupakan alasan mendasar untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan program forum keserasian sosial mampu meredam koflik sosial di lokasi rawan konflik.

Program keserasian sosial yang dilaksanakan forum pada kenyataannya bermanfaat dalam meredam terjadinya konflik karena program berdasar kebutuhan dan aspirasi masyarakat, walaupun hasil akhir yang dicapai relative belum optimal. Terlebih dapat menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dilandasi nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati sehingga dapat membangun, memantapkan, mengembangkan dan memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat dalam persaudaraan sejati. Setidaknya program mampu menjembatasi kebutuhan masyarakat supaya potensi yang menimbulkan konflik dapat diminimalisir. Berpijak dari itu, untuk mengetahui sejauhmana eksistensi forum dalam meredam konflik sosial mendasari dilakukan penelitian selanjutnya melengkapi penelitian terdahulu yang berkaitan. Hal ini berdasarkan kondisi empirik menunjukkan bahwa dana penguatan untuk pembangunan fisik dapat digunakan sebagaimana peruntukkannya. Sebagaimana di Kota Ambon, Provinsi Maluku menunjukkan bahwa kegiatan forum keserasian sosial relatif mampu meredam konflik sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendasari dan memacu penulis untuk mengetahui sejauhmana eksistensi forum keserasian sosial mampu meredam konflik dan untuk mengetahui bagaimana kondisi faktual daerah rawan konflik. Tujuan penelitian adalah mengetahui eksistensi forum keserasian sosial mampu meredam konflik dan untuk mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik. Manfaat yang diperoleh penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya penguatan sosial masyarakat rawan konflik. Secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Perlidungan dan Jaminan Sosial khususnya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, selaku penanggungjawab langsung program keserasian sosial dalam memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di daerah rawan konflik.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan konflik yang dilaksanakan secara komprehensif. Berkait hal tersebut pendekatannya menggunakan metode gabungan *(Mix Methods)* yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode gabungan ini untuk mencoba menelaah secara mendalam kegiatan forum keserasian sosial dalam rangka meredam konflik sosial setempat. Metode kuantitatif digunakan untuk memenuhi kebutuhan obyektivitas sebagai upaya verifikasi terhadap sejumlah asumsi sistematis, spesifik, jelas, sequnsial, dan rinci. Sementara metode kualitatif sebagai metode dipilih untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan terinci (Sugiyono, 2006) tentang pelaksanaan forum keserasian dalam upaya meredam konflik sosial di lokasi penelitian. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) lebih menguatkan, bahwa metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi forum keserasian sosial yang yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Lokasi pengumpulan data di Kota Ambon, Provinsi Maluku, tempat ini merupakan salah satu daerah rawan konflik sosial di Indonesia yang direkomendasikan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Kerawanan konflik ditentukan berdasarkan kesenjangan ekonomi (kemiskinan), sosial (pendidikan dan kesejahteraan), keberagaman budaya (agama dan etnis), politik (kelompok elit, kebijakan, dan birokrasi), dan kondisi geografis (kepadatan penduduk) (Tryatmoko, dkk, 2011). Sumber data dipilih dari sejumlah orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberi informasi berkait fenomena yang diteliti agar data yang diperoleh handal, meliputi tokoh masyarakat/masyarakat, pengurus forum keserasian sosial, aparat dinas sosial setempat keseluruhan sejumlah 30 orang.

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan *FGD (Focus Group Discussion)* untuk *mengcrosscek* data lapangan yang dihadiri pengurus forum, pekerja sosial, pendamping forum dan dinas terkait pengelolaan bencana sosial.Sementara pengumpulan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, dari penelitian terdahulu dan berbagai sumber dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilaksanakan analisis yang sebelumnya telah dibedakan berdasarkan jenisnya. Data kualitatif dianalisis melalui tahapan pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data, dan penafsiran data. Analisis dimulai dengan proses menelaah data dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan reduksi dengan membuat abstraksi. Tahap berikutnya adalah penyusunan data dalam satuan-satuan dengan membuat koding, mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan dan penafsiran data serta pemaknaan data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh (Moleong, 2010). Pentahapan ini sejalan seperti yang diungkap Miles dan Huberman (Sugiyono, 2006), data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilaksanakan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan yang terus direvifikasi sampai diperoleh konklusi yang kokoh (Agus Salim, 2000).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Geliat Ambon sebagai Salah Satu Daerah Rawan Konflik Sosial**

Kementerian Sosial mencatat sekurangnya ada 143 daerah rawan konflik di Indonesia, salah satunya adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Masyarakat daerah ini relative sering terjadi pertikaian disebabkan intoleransi hingga berakibat bentrok dengan pemicu bermacam-macam, misalnya pertikaian antar warga, perkelahian, ataupun perebutan lahan tanah yang akhirnya menjurus pada SARA. Peristiwa konflik sering terjadi di tempat tersebut yang pada akhirnya Ambon identik sebagai salah satu daerah rawan konflik sosial sebagai imbasnya. Sebagaimana diketahui, konflik menimbulkan korban baik fisik, psikis maupun material.

Secara geografis tata letak Kota Ambon dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Kondisi ini tentunya merupakan lokasi rawan bencana alam. Berdasarkan aspek demografi masyarakat Kota Ambon bersifat heterogen terdiri penduduk asli dan pendatang. Hal ini berkait, lokasi merupakan kota pelabuhan dan pariwisata sebagai konsekuensinya banyak orang lalu lalang baik menetap maupun sebatas singgah, kondisi ini mewarnai geliat kehidupan masyarakat. Keheterogenan penduduk diasumsikan salah satu aspeknya dapat memicu terjadi konflik sosial karena berlatarbelakang sosial budaya bervariasi. Penduduk Ambon berjumlah 395.423 jiwa terdiri laki-laki sejumlah 197.529 jiwa dan perempuan sejumlah 197.894 jiwa dengan perbandingan sex ratio 99.82 (BPS, 2015). Sejumlah penduduk tersebut tersebar dan menempati di lima kecamatan, 29 desa, dan 21 kalurahan dengan jumlah bervariasi. Secara rinci persebarannya dapat disimak di bawah ini.

Tabel 1 Pembagian Wilayah Kota Ambon

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Ibu Kota | Desa | Kalurahan | Jumlah |
| 1  2  3  4  5 | Nusaniwe  Sirimau  Leitimur Selatan  Teluk Ambon Baguala  Teluk Ambon | Kel. Amahusu  Kel.KarangPanjang  Lehari  Passo  Wayame | 5  3  8  6    7 | 8  11  -  1  1 | 13  14  8  7  8 |
|  | Total |  | 29 | 21 | 50 |

Sumber: Data Monografi Kota Ambon, 2016

Pembagian wilayah Kota Ambon disimak dari keberadaan wilayah menunjukkan relative seimbang. Pada umumnya luas wilayah akan mempengaruhi jumlah keberadaan penduduk. Gambaran ini memperlihatkan, bahwa semakin luas pembagian wilayah maka jumlah penduduk dan potensi permasalahanpun lebih banyak. Hal ini terbukti dengan penduduk di Kecamatan Nusaniwe yang berjumlah 167.197 jiwa artinya lebih banyak dari jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Ambon yang sejumlah 11.222 jiwa. Sejumlah penduduk tersebut berdasarkan runutan wawancara bersifat heterogen karena berasal dari berbagai suku bangsa.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa suku bangsa yang mendiami Ambon , antara lain suku bangsa Ambon, Kei, Tionghoa, Minangkabau, Papua, Melayu, Jawa, Minahasa, Sunda, Timor. Keheterogenan suku bangsa yang mewarnai masyarakat Ambon hakikatnya merupakan modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan memperlihatkan, banyaknya suku bangsa salah satunya dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial di masyarakat, hal ini ditengarai tidak ada atau belum terbangun ketahanan sosial di masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat diharapkan mampu meminimalisir dan atau mencegah pemicu timbulnya konflik sosial sehingga lingkungan kondusif.

2. **Potensi dan Dampak Konflik di Kota Ambon**

Kota Ambon, Provinsi Maluku sudah tidak asing dengan sebutan daerah konflik. Peristiwa yang terjadi berkait dengan permasalahan konflik senantiasa menghiasi berbagai berita di media baik cetak maupun elektronik . Tahun 1999 merupakan titik awal terjadinya peristiwa konflik besar yang sempat menggemparkan karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya korban, baik korban jiwa, harta benda, maupun fasilitas umum. Runutan wawancara dari sumber data terungkap, bahwa konflik terjadi bermula oleh perebutan lahan yang pada akhirnya melebar menjadi permasalahan kriminal, seperti perkelahian, minuman keras (miras) bahkan perselisihan disebabkan kesalahpahaman yang umumnya bermotif SARA. Berbagai peristiwa tersebut berdampak pada fasilitas umum yang diklaim milik golongan tertentu, seperti pasar untuk kaum muslim dan pasar khusus non muslim. Situasi kurang kondusif ini berlangsung cukup lama, dan saat ini pertikaian kedua belah pihak berangsur kembali normal. Situasi semakin kondusif ini disebabkan campur tangan berbagai pihak terutama tokoh adat, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat yang relative mampu meredam konflik berkepanjangan tersebut. Sedikit mengungkap peristiwa sekitar dua bulan lalu yang mana terjadi perselisihan antara kelompok remaja/geng hingga menyebabkan perkelahian dan pertikaian yang akhirnya menyebabkan bentrok antar kedua belah pihak. Pemicu peristiwa disinyalir berupa pengaruh minuman keras (miras), seperti ditegaskan Kepala Desa Hunuth

“Sekitar dua minggu yang lalu telah terjadi perkelahian yang pelakunya rata-rata berusia muda. Pemicunya ada sekelompok pemuda yang minum-minuman keras, karena pengaruh alkohol sehingga membuat mereka kehilangan kendali dengan membuat kegaduhan daerah setempat. Masyarakat yang tidak terima perlakuan tersebut pada akhirnya melawan yang berakibat terjadi bentrok, hingga beberapa hari suasana masih mencekam dan aparat keamanan masih siaga.”

Sementara di Dusun Amaory, Kecamatan Passo terjadi konflik sosial yang menyebabkan seluruh penduduknya direlokasi. Konflik ini disinyalir disebabkan dan dipengaruhi SARA, akibatnya menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Pemerintah tidak tinggal diam dan memberi bantuan berupa lahan pemukiman baru yang didukung *support* dana untuk membangun pemukiman baru senilai Rp 12 juta/unit dengan ukuran 4x5 meter sedangkan yang menerima relokasi sebanyak 340 KK dengan luas tanah untuk lahan relokasi sebanyak 13 hektar.

Hasil identifikasi dari FGD didukung data dokumentasi menyebutkan, bahwa setelah terjadi konflik pada tahun 1999 beberapa kali telah terjadi konflik kembali. Rekapitulasi selama lima tahun terakhir mulai tahun 2012 hingga 2017 telah terjadi beberapa kasus konflik social dan teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2 Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Tempat | Uraian peristiwa | Dampak |
| 1  2  3  4  5  6 | 2012  2013  2014  2015  2016  2017 | Desa Pelaw  Desa Kolser  Desa Parto dan Desa Harin  Desa Negeri Lima  Desa Seith.  Kalurahan Hunipopu  Kalurahan Silak  Desa Iha dan desa Lulu | Konflik sosial.  Konflik sosial  Konflik sosial.  Konflik sosial  Konflik sosial  Konflik sosial.  Konflik sosial | 402 unit rumah terbakar  3 orang meninggal.  29 unit rumah terbakar.  25 unit rumah terbakar.  105 unit rumah terbakar.  45 unit rumah terbakar.  24 unit rumah terbakar. |

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017.

Serangkaian konflik yang terjadi setelah diidentifikasi selama kurun waktu berurutan diperlihatkan di table 2 di atas, bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat rawan terjadi konflik sosial. Asumsi peristiwa berawal dari perselisihan antar etnis yang melebar menjadi konflik sosial. Dampak konflik berkepanjangan menyebabkan dampak besar pada masyarakat berupa korban jiwa dan harta benda.

1. **Forum Keserasian Sosial dalam Upaya Menangani Konflik Sosial**

Berpijak dari berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi, salah satu upaya untuk menangani adalah melalui kelompok masyarakat di akar rumput dalam bentuk forum keserasian sosial. Keserasian sosial di arahkan mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial yang harmonis antar warga serta terpelihara perdamaian berkelanjutan di lingungan masyarakat. Nilai yang terkandung dalam keserasian sosial, yaitu mengandalkan kekuatan lokal, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya lokal, memperkuat kepemimpinan lokal, memperkuat kepranataan lokal sebagai wadah pertukaran komunikasi, informasi, edukasi, dan persuasi antar warga yang berbeda sekaligus sebagai agen keserasian sosial di tingkat hulu, mengoptimalkan proses dan mekanisme lokal, mengandalkan keterampilan lokal sebagai teknologi pencegahan konflik sosial (Departemen Sosial, 2016). Forum dibentuk arahnya untuk meminamilisir ataupun mencegah terjadinya konflik supaya terjadi kehidupan damai dengan terbangunnya saling percaya, komunikasi yang santun dan kohesivitas sosial antar warga. Oleh karena itu inti program keserasian sosial adalah membangun, memantapkan, dan mengembangkan serta memelihara kehidupan bersama *(live hood),* di antara masyarakat di lokasi tempat tinggal, persaudaraan sejati *(brother hood)*, kebersamaan *(together mess)*, rasa senasib sepenanggungan, dan solidaritas sosial (kohesivitas, kesetiakawanan, dan solidaritas).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan forum keserasian social mendapat bantuan penguatan sebanyak Rp 109 juta sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Keserasian Sosial (2016) dialokasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Pekerjaan fisik sebanyak Rp 97.000.000, pembangunan tugu sebanyak Rp 5.000.000,-, kegiatan non fisik sebanyak Rp 2.000.000,- dan kegiatan operasional dialokasikan sebanyak Rp 5.000.000,-. Pada kenyataannya melalui pendalaman dengan pengurus forum dan dokumen menyatakan, bahwa bantuan dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk membangun sarana fisik yang disepakati (balai pertemuan) sehingga dilakukan tambahan dana secara swadaya dan terkumpul sejumlah Rp 15.050.000,-. Pembangunan balai pertemuan merupakan kesepakatan warga yang peruntukannya sebagai sarana musyawarah warga setempat. Sementara secara swadaya dilaksanakan perbaikan lonceng gereja dan pembangunan jalan setapak. Kegiatan tersebut memancing masyarakat berpartisipasi terlibat kegiatan kemasyarakatan dengan tidak membedakan status sosial ekonomi, latar belakang keluarga atau pendidikan diharapkan masyarakat bekerjasama sehingga tercipta kohesivitas dan meminimalisir pertentangan.

Sejalan dengan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya menangani konflik sosial masyarakat dilihat dari efektifnya, menggunakan penghitungan analisis yang mengacu pada George C. Edward III berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, komitmen dan pelaksana. Keempat aspek ini diasumsikan mampu memberikan sumbangan efektif forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial. Berdasar penghitungan analisis secara kuantitatif terhadap efektivitas keberadaan forum keserasian sosial dari aspek komunikasi hasil analisis korelasi menunjukkan angka 0,536. Tingkat komunikasi ini memberikan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program, artinya keberhasilan program dipengaruhi oleh lancarnya komunikasi antara pengurus dan pihak lain terkait pelaksanaan program. Sementara sumbangan efektif sebesar 16,09, artinya meskipun tingkat komunikasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan tidak sebanyak variable lain. Kondisi ini terkait dengan nilai koefisien terstandart pada hasil uji regresi yang menunjukkan angka 0,299 dengan nilai signifikansi 0,187 dimana > α = 0,05, artinya tingkat komunikasi memberikan sumbangan bagi keberhasilan kegiatan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Nilai komunikasi tinggi berarti tidak serta merta dapat memberikan sumbangan efektif besar terhadap keberhasilan program keserasian sosial. Hal ini dimungkinkan karena tingkat komunikasi berada bersama dengan variabel lain.

Sejatinya komunikasi dilakukan secara baik pada tataran pengelola forum. Pengelola melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendamping melaksanakan tugas pendampingan sejak sebelum, saat pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, mendampingi, menggerakkan potensi kesejahteraan social, menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, memonitor hingga menyusun laporan. Hal ini relative belum dilaksanakan secara maksimal walaupun seorang pendamping telah menerima pembekalan. Disatu sisi keberadaan forum darahkan memberi pencerahan, kemanfaatan, dan aksesibilitas terhadap masyarakat.

Aspek sumberdaya menurut penghitungan analisis korelasi menunjukkan angka 0,361, artinya tingkat sumber daya memberi hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum. Penghitungan sumbangan efektif menyatakan bahwa tingkat sumberdaya diikuti dengan kenaikan tingkat keberhasilan kegiatan. Hasil penghitungan sumbangan efektif tingkat sumberdaya terhadap tingkat keberhasilan kegiatan forum keserasian sosial sebesar 2,56%. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa tingkat sumberdaya terbukti mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan kegiatan. Kondisi ini berkaitan dengan nilai koefisien terstandart pada hasil uji regresi menunjukkan angka – 0,071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,722 dimana > α = 0,05, artinya bahwa tingkat sumberdaya memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan walaupun nilainya tidak signifikan. Kajian empirik menunjukkan yang dimaksud sumber daya tidak semata-mata ditinjau dari tingkat pendidikan pelaksana tetapi dipengaruhi berbagai faktor, melalui runutan wawancara menunjukkan, antara lain ditengarai belum adanya dukungan maksimal dari pemerintah daerah terhadap dukungan dana misalnya melalui dana APBD. Sementara itu juga ditengarai belum adanya partisipasi dunia usaha dan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung urgennya program forum keserasian sosial.

Komitmen juga dipergunakan untuk mengukur tingkat efektivitas forum keserasian sosial dalam mencegah konflik sosial. Analisis korelasi pada aspek ini menunjukkan angka 0,523. Hal ini memperlihatkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum yang didukung oleh kepedulian dari berbagai elemen, seperti pengurus forum, pendamping dan atau fasilitator dalam mengelola kegiatan forum. Perhitungan persentase sumbangan efektif tingkat komitmen atas keberhasilan pelaksanaan forum sebesar 9,57%. Kondisi ini terkait dengan nilai koefisien terstandart pada hasil uji regresi yang menunjukkan angka 0,183 dengan nilai signifikansi 0,489 dimana >α= 0,05, artinya bahwa tingkat komitmen memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan bahwasanya nilai tinggi ternyata tidak dapat memberikan sumbangan efektif besar terhadap keseluruhan keberhasilan kegiatan forum. Untuk memperbaiki kondisi tersebut diharapkan ada dukungan dari pemerintah setempat, antara lain dalam bentuk Peraturan daerah (Perda)

Ditinjau dari aspek pelaksana, analisis korelasinya menunjukkan antara tingkat struktur pelaksana dengan tingkat keberhasilan kegiatan program menunjukkan angka 0,616. Kondisi ini menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan kegiatan program. Ketepatan penempatan struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tercapainya keberhasilan kegiatan program keserasian sosial yang telah ditetapkan. Perhitungan sumbangan efektif tingkat struktur pelaksana terhadap tingkat keberhasilan program keserasian sosial menunjukkan sebesar 19,59%, artinya meskipun tingkat struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan program, namun sumbangan efektifnya terhadap keberhasilan program secara keseluruhan tidak sebanyak variable lain. Hal ini terkait dengan nilai koefisien terstandart hasil uji regresi sebanyak 0,318 dengan nilai signifikansi 0,299 dimana >α= 0,05, artinya bahwa tingkat struktur pelaksana memberikan sumbangan bagi keberhasilan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan walaupun tingkat struktur pelaksana menunjukkan nilai tinggi ternyata tidak selalu dapat memberikan sumbangan efektif yang besar terhadap keberhasilan program keserasian sosial, diasumsikan ada variable lain yang berpengaruh. Hasil empirik menunjukkan kelengkapan dan ketepatan struktur pelaksana dari forum yang didukung perencanaan dan komitmen pelaksana akan mampu mendukung keberhasilan program forum.

Sejalan dengan hal tersebut, mengacu teori Edward III memperlihatkan bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial di Kota Ambon menurut perhitungan sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan nilai 42,7%. Nilai ini merupakan nilai sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan keterbatasan variable independen dari komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur pelaksana.

Berikut disampaikan hasil perhitungan sumbangan efektif variabel komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur.

Tabel 3 Perhitungan Sumbangan Efektif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel  Implementasi | b | Koefisien  Korelasi | Sumbangan  Efektif Per Variabel | Sumbangan Efektif Total (R2) |
| Komunikasi | ,299 | 0,538 | 16,10418 | 42,65933 |
| Sumberdaya | -,071 | 0,361 | -2,57394 |  |
| Komitmen | ,183 | 0,523 | 9,544803 |  |
| Struktur | ,318 | 0,616 | 19,58429 |  |

Sumber: Data primer, 2018

Hasil perhitungan sumbangan efektif dari keempat variabel menunjukkan angka 42,7%. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik di Kota Ambon melalui program yang dicanangkan dinilai berhasil walaupun tidak serta merta secara maksimal karena dipengaruhi faktor lain yang ikut berpengaruh dan tidak diukur secara statistik. Berdasarkan diskusi terfokus ditemukan kemungkinan faktor lain tersebut berupa *kearifan local. Kearifan local* berupanilai kemasyarakatan dan ketokohan baik tokoh adat maupun tokoh agama ataupun budaya lokal ditengarai mampu menyumbang dalam mendukung meminimalisir bahkan mencegah konflik. Hal tersebut diperkuat oleh Ode (2015) yang mengemukakan tentang keberadaan budaya lokal yang dapat digunakan mengendalikan terjadinya konflik sosial dalam tulisannya yang berjudul Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku. Sebagaimana nilai kemasyarakatan berupa semboyan *Orang Basudara-Ale rasa Beta rasa* (artinya kurang lebih orang bersaudara merupakan satu hati satu jantung) sangat dominan dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di Kota Ambon. Suasana kondusif tersebut mempengaruhi terhadap timbulnya potensi konflik sosial.

Penelusuran dari wawancara kepada masyarakat terungkap bahwa adanya forum keserasian sosial melalui programnya merasa kemanfaatannya dan menyatakan cukup terbantu. Sementara pihak aparat pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk bekerja sama dalam upaya meredakan potensi konflik melalui dukungan kearifan local, komunikasi yang santun, dan kepercayaan serta yang terpenting adalah membentuk suatu program membangun masyarakat disebut *Pella Gandong.* Sementara ditinjau dari aspek bantuan penguatan yang diterima sebesar Rp 109 juta dimanfaatkan untuk pembangunan balai pertemuan dan tugu keserasian social bahkan ditambah swadaya dari masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan tersebut. Balai pertemuan diperuntukkan sebagai tempat musyawarah warga yang selama ini dilaksanakan di balai desa. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Raja (sebutan Kepala Desa) Desa Hunuth yang menyatakan sebagai berikut.

“ Balai pertemuan ini bisa selesai pembangunannya selain dari bantuan penguatan juga adanya swadaya masyarakat setempat. Ujudnya tidak sebatas bantuan materi tetapi juga bantuan tenaga karena pengerjaannya murni dilakukan oleh masyarakat sehingga alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja bisa dihemat. Lebih terpenting pembangunan balai ini adalah wujud partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan bekerja sama sehingga dapat membangun nilai keserasian dan kesetiakawanan social masyarakat setempat, kondisi ini secara tidak langsung meminimalisir potensi konflik”.

Pernyataan Kepala Desa Hunuth tersebut menandakan apresiasi yang baik terhadap warganya yang secara sukarela ikut berpartisipasi dalam pembangunan balai pertemuan. Hal ini menyiratkan ada kekompakan dari masyarakat untuk bersatu mengingat persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan untuk meminimalisr potensi konflik. Balai pertemuan ditujukan sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk musyawarah mengungkapkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi dan membahas pelaksanaan program. Kegiatan ini diharapkan berbagai permasalahan diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan pertikaian bahkan bentrok. Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Ambon frekuensi terjadi konflik social cukup banyak, melalui progam keserasian social berbagai potensi konflik dapat diminimalisir yang didukung peran ketokohan, nilai local, dan nilai kebersamaan.Sementara pembangunan tugu keserasian social sempat terhambat penyelesaiannya disebabkan lamanya proses pemesanan prasasti. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa bentuk dan kualitas bahan prasasti dinilai cukup baik menandakan adanya keseriusan forum memberikan yang terbaik terhadap pelaksanaan program keserasian sosial.

Berdasarkan pengamatan dan dukungan wawancara, menunjukkan bahwa bantuan penguatan keserasian sosial yang berfokus pada pembangunan fisik perlu ditinjau ulang dan seyogyanya mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan pilar kesejahteraan sosial lokal lainnya sebagai ruh utama program. Alasan yang mendasari bahwasanya jumlah bantuan penguatan keserasian sosial untuk pembangunan fisik tidak mencukupi sehingga dilaksanakan swadaya masyarakat atau permohonan bantuan dari APBDes/APBD Kota/Kab.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan ulasan tentang eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya mencegah konflik sosial di masyarakat di Ambon dapat disimpulkan bahwa forum keberadaan forum tersebut melalui program yang dilaksanakan ternyata efektif dapat meminimalisir atau mencegah potensi konflik yang diperlihatkan kondisi kemasyarakatan relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Keefektifannya dinyatakan sebatas sejumlah 42,7%. Hal ini kemungkinan dipengaruhi keterhambatan komunikasi antara penyusun dengan pelaksana program, keterbatasan aksesibilitas sumberdaya pelaksanaan program dan sumber daya lainnya juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dukungan keberadaan kearifan lokal berupa nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat mampu menyumbang keberhasilan pelaksanaan program. Kearifan lokal dan jejaring kemitraan merupakan potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial setempat sebagai alternative pengembangan program keserasian sosial. Sementara bantuan penguatan keserasian sosial terutama yang diperuntukkan pembangunan fisik dalam hal ini balai pertemuan kenyataannya dana yang diperoleh tersebut kurang memadai sehingga untuk mengatasinya dibangun swadaya masyarakat.

**SARAN**

Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial supaya lebih mendayagunakan kearifan dan budaya lokal serta menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program diharapkan ada peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan, dan monitoring agar eksistensi forum keserasian sosial dapat lebih bermanfaat dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Disampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan dalam kegiatan pengumpulan data, kepada pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberi masukan sehingga naskah hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Salim. (2000). *Teori dan SParadigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bakri, H.(2015). *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon.* The:Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas Vol.1, No 1 January 2015, 51-59.

Badan Pusat Statistik tahun 2015.

Edward III, G.C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly

Koswara,H , Mildawati, M, & Tukino. (2005). *Menyiram Bara Api Konflik*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial, (2016). *Petunjuk Teknis Keserasian Sosial Tahun 2016.* Direktorat perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Moleong, Lexy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Monografi Kota Ambon tahun 2016.

Ode, S. (2015). *Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku (*Kajian Tantangan dan Revitalisasi Budaya pela). Politika, Vol. 6 No. 2 Oktober, 93-100.

Rahyono, F. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastara.

Ratih Probosiwi, dkk, (2017). *Penguatan Sosial Di Daerah Rawan Konflik (Implementasi Program Keserasian Sosial)*. Yogyakarta: B2P3KS Press

Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R D*. Bandung: Alfabeta.

Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta: KoPi&Pustaka Pelajar.

Sumarno, S dan Roebiyantho,

H. (2013). *Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: P3KS Press.

Sukardi. (2016). *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.* Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 1, 70-89.

Witaradya, K. (2010, January 26). *Implementasi Kebijakan Model C G Edward III.* Diambil kembali dari Kertya Witaradya:Government Consultan: -iii/

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

Wirutomo, P. (1992). *Pedoman Studi Kualitatif Pemantauan Keserasian Sosial.* Jakarta: Laboratorium Sosiologi Fisip UI.

Witaradya, K. (2010, January 26). *Implementasi Kebijakan Model C G Edward III.* Diambil kembali dari Kertya Witaradya: Government Consultan: https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward